

# Keterlibatan Perempuan secara Formal dalam Pengelolaan Kegiatan Pariwisata di Desa Wisata Kebonagung, Bantul

Diantika Ayu Pratiwi

Program Studi Pariwisata, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia  
diantikaayu00@mail.ugm.ac.id

## Abstract

*The tourism industry is seeing rapid growth. Nevertheless, the involvement of women in the official administration of the tourism industry remains limited. The objective of this study was to examine the extent of women's formal involvement in the management of tourist operations in Kebonagung tourist Village, located in Imogiri, Bantul Regency, in the Daerah Istimewa Yogyakarta Province. The analysis was conducted using the MOA (Motivation, Opportunity, and Ability) participation model. This study employed a qualitative methodology, utilizing techniques such as observation, interviews, and documentation. Data collection spanned a duration of 20 days, commencing on April 1st and concluding on April 20th, 2022. The researcher conducted interviews with three managers and pioneers of the Kebonagung Tourism Village, three female members who hold formal positions in the administration structure of the village, and three female local residents who actively participate in tourism activities. The findings of this study indicate that the level of women's engagement in formal management, as measured by factors such as motivation, opportunity, and ability, was significantly low. Additionally, the participation of women in formal management positions was shown to be extremely limited. The low participation of women in formal management in Kebonagung Tourism Village can be attributed to various factors. These include a lack of motivation among women to engage in management roles, limited opportunities that are not effectively utilized, inadequate or insufficient capabilities, as well as internal and external barriers that hinder women from formally participating in managing tourism activities.*

**Keywords:** *Formal women's involvement, women's participation, tourism village, MOA, participatio.*

## Pendahuluan

Ekualitas gender antara perempuan dan laki-laki telah menjadi salah satu agenda utama dari 17 program pembangunan berkelanjutan SDGs (*Sustainable Development Goals*) yang ditetapkan dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dilaksanakan di New York pada tanggal 25 September 2015. Ke 17 agenda ini akan menjadi fokus pembangunan berkelanjutan tahun 2015-2030 (Susanty, 2020).

Melihat urgensi dari kesetaraan gender hingga dicantumkan dalam tujuan utama SDGs, dapat disimpulkan bahwa peran dan hak antara laki-laki dan perempuan harusnya setara. Pada tahun 2017, dituliskan bahwa indeks kesetaraan gender di Indonesia termasuk rendah, Indonesia bertengger di urutan 105 dari total 188 negara (*The United Nations Development Programme*) (UNDP), 2017). Faktor-faktor pendukung ketidaksetaraan gender dipengaruhi oleh latar belakang ekonomi, terbatasnya lapangan kerja, pelayanan fasilitas kesehatan yang buruk, ketimpangan

pendidikan dan kekerasan berbasis gender (The United Nations Development Programme, 2017). Industri pariwisata pun tidak terlepas dari praktik ketidaksamaan gender, pada contohnya, dalam industri pariwisata, perempuan yang berada dalam tingkatan manajer seringkali mendapat diskriminasi seperti persepsi bahwa seharusnya perempuan lebih berorientasi pada keluarga dan seharusnya tidak lebih ahli daripada laki-laki. (Carvalho, Costa, and Torres, 2019). Selain itu, meskipun industri pariwisata berkemampuan untuk memberikan pengembangan diri, sosial, politik, bahkan ekonomi kepada perempuan, budaya tradisional masih menghambat perempuan untuk mendapatkan keuntungan penuh dari industri pariwisata (Gil Arroyo, Barbieri, Sotomayor, and Knollenberg, 2019). Maka dari itu, Kesetaraan gender dan penyamaan hak antara laki-laki dan perempuan ini menjadi penting untuk dapat dipraktikkan dalam bidang pariwisata.

Gender menurut Margaret Swain (1995: 258), adalah suatu sistem label atau identitas yang dibangun secara budaya, diekspresikan dalam gagasan maskulinitas dan feminitas, yang kemudian berinteraksi dengan hubungan yang terstruktur secara sosial dalam pembagian peran kerja, seksualitas, dan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki. Gender juga melahirkan sebuah sistem gender. Sistem gender merupakan sistem yang mencakup proses untuk mengartikan bahwa laki-laki (maskulin) dan perempuan (feminin) sebagai sesuatu yang berbeda secara sosial (Ridgeway, 1999). Sistem ini kemudian juga saling berhubungan dengan yang disebut sebagai peran gender. Pada proses interaksi sosial di masyarakat, laki-laki dan perempuan mempunyai peran gender yang berbeda. Perbedaan peran ini juga menjadi dasar bagaimana status kekuasaan laki-laki dan kekuasaan perempuan di masyarakat sosial (Mosse, 1996: 30-31).

Peran gender adalah sebuah peran yang diekspektasikan dan diharapkan oleh lingkungan mengenai perilaku seorang individu sesuai jenis kelaminnya baik itu perempuan maupun laki-laki, berdasar kepada anggapan dan kepercayaan masyarakat mengenai jenis gender tersebut. Sampai saat ini budaya patriarki masih langgeng berkembang di tatanan masyarakat Indonesia (Sakina, 2017). Istilah patriarki mengacu pada hubungan kekuasaan di mana kepentingan laki-laki berada di atas kepentingan perempuan. Relasi kekuasaan ini memiliki banyak bentuk, dari seksual, pembagian kerja dan sosial, organisasi, dan norma-norma. Kekuasaan patriarki pada dasarnya dibangun pada konstruksi sosial yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri (Weedon, 1987: 2-3). Di lain sisi, patriarki masih dipahami oleh perempuan sebagai sesuatu yang alami atau memang sudah seharusnya begitu. Hal ini kemudian mencetuskan banyak bidang dan cara kerja kehidupan yang melestarikan permasalahan dalam ketidaksetaraan gender (Rokhimah, 2014: 133).

Sejarah masyarakat patriarki sejak awal membentuk peradaban manusia yang menganggap bahwa laki-laki lebih kuat (superior) dibanding perempuan. Hal ini terjadi secara bertingkat mulai dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun bernegara. Budaya patriarki ini dilanggengkan dan membentuk perbedaan perilaku, status, dan otoritas antara laki-laki dan perempuan di masyarakat yang kemudian menjadi tingkatan peringkat gender (Faturrochman, 2002: 16).

Budaya patriarki dapat mudah ditemukan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, hingga berbangsa dan bernegara. Hal ini berlanjut menjadi sumber pembenaran terhadap sistem pembagian kewenangan, sistem pengambilan keputusan, sistem pembagian kerja, sistem kepemilikan dan sistem distribusi sumber daya yang bias gender. Budaya yang terus diturunkan ini akhirnya akan bermuara pada terjadinya perlakuan diskriminasi, marginalisasi, eksploitasi maupun kekerasan terhadap perempuan (Muhadjir, 2005: 166). Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa sistem patriarki yang tidak fleksibel dan kaku juga sangat berpengaruh terhadap bagaimana kehidupan antara laki-laki dan perempuan dijalankan dalam lingkup sosial dan bermasyarakat.

Implikasi dari budaya patriarki dapat berupa perempuan mengalami hambatan yang disebabkan oleh beban peran ganda yang mereka alami. Peran ganda pada perempuan terjadi ketika perempuan dihadapkan pada dua peran sekaligus. Peran ganda pada perempuan dapat ditunjukkan seperti peran perempuan sebagai seorang istri atau ibu rumah tangga dan peran lain seperti bekerja untuk mencari nafkah (Khaerany, 2019). Peran ganda ini sering menimbulkan dampak psikologis yang merugikan bagi perempuan, mereka kemudian tidak memiliki waktu yang cukup untuk kedua peran sekaligus dan untuk diri mereka sendiri sehingga peran mereka tidak dapat dilakukan secara maksimal (Kitchener, 2019). Data dari World Tourism Organization (WTO, 2011) menunjukkan bahwa perempuan dapat berperan sebagai pekerja sektor pariwisata secara formal namun, perempuan kebanyakan hanya diposisikan pada jenis pekerjaan yang berhubungan dengan administrasi dan pelayanan. Adapun, mereka tidak ada di tingkat manajemen atau tingkat profesional karena hal tersebut masih sulit diwujudkan (Andani, 2017: 3). Mendukung pernyataan tersebut, Jordan Cave dan Kilic (2010) memaparkan bahwa di sektor pariwisata, perempuan memiliki kesempatan promosi jabatan yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Adapun, ketika perempuan berhasil mencapai posisi sebagai manajer, kesempatan tersebut cenderung terbatas pada jenis jabatan pengelolaan tertentu seperti manajer sumber daya manusia.

Fenomena perbedaan kesempatan antara perempuan dan laki-laki dalam industri pariwisata pun juga dapat ditemukan pada lingkup kecil dalam industri besar pariwisata seperti desa wisata. Provinsi D.I. Yogyakarta memiliki 153 desa wisata yang tersebar pada lima kabupaten (Bappeda Provinsi Yogyakarta, 2022). Salah satu dari mereka adalah Desa Wisata Kebonagung. Desa Wisata Kebonagung merupakan salah satu desa wisata yang terletak di kecamatan Imogiri, Bantul, Yogyakarta, yang terkenal sebagai desa wisata pertanian dan budaya. Desa Wisata Kebonagung termasuk desa wisata yang telah berdiri cukup lama yaitu 20 tahun, sejak dibentuk tahun 2003. Meskipun telah berdiri lama, partisipasi perempuan secara formal dalam pengelolaan Desa Wisata Kebonagung seperti anggota inti pengurus harian Desa Wisata belum maksimal. Dalam susunan kepengurusan Desa Wisata Kebonagung terbaru yang dibentuk pada tahun 2020 bertepatan dengan masa pandemi, dituliskan dari sembilan divisi hanya tiga divisi yang masing-masing memiliki satu anggota perempuan yaitu divisi sekretaris, bendahara dan seksi homestay. Adapun,

seksi konsumsi diserahkan pada dua kelompok PKK. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa keterlibatan para perempuan untuk terlibat secara formal dan berperan sebagai pengambil keputusan belum bisa dilakukan.

Penelitian dilakukan pada desa wisata yang telah lama berdiri seperti Desa Wisata Kebonagung sebab pendirian yang telah lama pun tidak berpengaruh banyak terhadap partisipasi perempuan dalam susunan kepengurusan formal desa wisata. Untuk itu, penelitian ini akan berfokus pada keterlibatan perempuan secara formal dalam pengelolaan Desa Wisata Kebonagung, Imogiri, untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan perempuan secara formal dalam pengelolaan desa wisata yang telah lama berdiri. Penelitian ini menggunakan konsep model partisipasi MOA yang mencakup motivasi, peluang, dan kemampuan (*motivation, opportunity, dan ability*) oleh Kam Hung (2011). MOA mencakup poin-poin penilaian model partisipasi seperti motivasi, peluang, dan kemampuan (*motivation, opportunity, dan ability*). Analisis model partisipasi MOA ini menandai faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat dan hasil dari perilakunya yang dapat memberikan dalam pengelolaan desa wisata. Teori ini dipilih karena sesuai dengan fokus penelitian yaitu keterlibatan perempuan secara formal dalam pengelolaan kegiatan wisata di Desa Wisata Kebonagung.

Menurut model MOA, motivasi, kesempatan/peluang, dan kemampuan untuk berpartisipasi adalah poin-poin utama dalam partisipasi masyarakat dalam suatu sistem. Selain itu, partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor seperti sosial budaya lokal, ekonomi, kondisi politik, dan pribadi (Tosun 2000 dalam Cole 2006).

Poin pertama yaitu motivasi. Motivasi adalah penggerak internal yang penting yang memiliki kekuatan untuk proses pengambilan keputusan perilaku (Bettman, 1979). Pada konteks pariwisata, motivasi menjadi penentu utama yang memengaruhi pilihan untuk berpartisipasi (Kayat, 2002). Dalam perkembangan pariwisata, manfaat yang dirasakan oleh individu dari pariwisata (baik positif maupun negatif) adalah faktor penguat sekaligus penghambat memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi. Dengan kata lain, mereka yang merasakan peningkatan kesejahteraan dan manfaat positif cenderung lebih mendukung dan motivasi mereka tinggi untuk ikut berpartisipasi.

Poin kedua yaitu peluang. Peluang dalam konteks partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai keadaan yang mendukung untuk memfasilitasi keterlibatan publik dalam partisipasi secara aktif. Peluang terjadi ketika pengembangan pariwisata dijalankan menggunakan pendekatan partisipatif dan memberikan ruang untuk partisipasi masyarakat. Partisipasi tidak dapat terjadi tanpa pendekatan dan komunikasi terbuka, komunikasi antara pengurus pariwisata dan masyarakat haruslah terjalin secara baik (Behaire dan Elliott-White 1999).

Poin ketiga adalah kemampuan. Jamal dan Getz (1999) mengemukakan bahwa hanya karena individu memiliki hak untuk berpartisipasi tidak berarti mereka memiliki kemampuan untuk melakukannya. Kemampuan adalah poin yang kompleks terdiri dari kombinasi faktor, seperti

kesadaran, pengalaman, pengetahuan, keterampilan, akses ke informasi, dan sumber daya keuangan. Anggota masyarakat di negara-negara berpenghasilan rendah, biasanya tidak siap untuk pengembangan pariwisata karena kurangnya pengalaman dan kurangnya kesadaran akan manfaat pengembangan pariwisata (Timothy 2002). Simmons (1994) mencatat bahwa pendidikan dapat memperkuat pengalaman dan kesadaran untuk berpartisipasi sehingga meningkatkan kemampuan mereka untuk berpartisipasi secara aktif. Oleh karena itu, selain dari dalam diri masyarakat pengembangan dan pengelolaan dalam kegiatan pariwisata berbasis masyarakat harus dibantu oleh instansi-instansi pemerintah atau kelompok-kelompok yang sudah berpengalaman dalam mengembangkan kegiatan pariwisata.

Dalam penelitian akan diteliti lebih dalam mengenai model partisipasi perempuan dalam pengelolaan secara formal di Desa Wisata Kebonagung dengan analisis model partisipasi MOA. Poin pertama yaitu motivasi perempuan dalam pengelolaan desa wisata dengan batasan pembahasan motivasi berdasarkan tiga komponen pokok motivasi oleh Purwanto (2006:72) yaitu:

- a) Menggerakkan atau menimbulkan keinginan pada seorang individu yang kemudian membuat individu tersebut untuk bertindak dengan cara tertentu.
- b) Menyalurkan tingkah laku, dengan demikian motivasi menyediakan suatu tujuan dan motivasi memengaruhi tingkah laku individu untuk diarahkan kepada suatu tujuan.
- c) Untuk menjaga atau menopang tingkah laku, lingkungan sekitar harus menguatkan dan mendukung motivasi individu tersebut untuk bertahan, hal ini dapat berupa dorongan atau kekuatan baik dari dalam individu itu sendiri maupun dari orang lain.

Poin kedua, membahas mengenai bagaimana peluang perempuan dalam berpartisipasi dikegiatan wisata di Desa Wisata Kebonagung termasuk hambatan yang ditemukan, yang digali lebih dalam menggunakan penjabaran definisi peluang berdasarkan Kam Hung (2011) yaitu adanya ruang gerak yang terbuka atau keadaan yang memungkinkan untuk memfasilitasi keterlibatan publik dalam partisipasi secara aktif, dan adanya pendekatan partisipatif

Poin terakhir yaitu poin kemampuan, dengan batasan pembahasan kemampuan individual berdasarkan uraian Spencer dan Spencer (1993:34), dikutip oleh Narimawati (2007:75) yaitu:

- a) Kemampuan intelektual berupa pengetahuan, pemahaman professional, keterampilan, pemahaman konsep dan pemecahan masalah lain-lain.
- b) Kemampuan emosional atau karakter, sikap, perilaku individu. Kemampuan untuk menguasai diri dan memahami lingkungan secara objektif dan bermoral sehingga memiliki emosi yang stabil ketika dihadapkan pada suatu permasalahan.
- c) Kemampuan sosial atau karakter, perilaku, kemauan dan kemampuan untuk membangun sistem kerjasama dengan orang lain dalam suatu organisasi.

## Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif agar dapat mengakomodasi berbagai informasi yang beragam berupa opini, pemikiran, dan pendapat individu perempuan di Desa Wisata Kebonagung dalam topik mengenai keterlibatan perempuan secara formal di desa wisata mereka, serta motivasi, kemampuan dan kesempatan mereka untuk terlibat dalam sektor formal pengelolaan Desa Wisata Kebonagung.

Penelitian mengambil lokasi di Desa Wisata Kebonagung di Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Waktu penelitian dilakukan selama kurun waktu 20 hari mulai dari tanggal 1 April 2022 hingga 20 April 2022. Desa Wisata Kebonagung dipilih karena keterlibatan perempuan dalam pengelolaan desa wisata secara formal sangat minim.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi pustaka. Data yang diperoleh adalah data primer melalui wawancara dan observasi secara langsung serta data sekunder didapatkan dari studi pustaka. Pengambilan sumber data wawancara pada penelitian ini menggunakan teknik "*purposive sampling*" dengan memilih informan sesuai dengan kebutuhan dan fokus dari penelitian.

Subjek dalam penelitian ini meliputi ketua Desa Wisata Kebonagung, divisi sekretaris, bendahara dan seksi konsumsi Desa Wisata Kebonagung (sebagai divisi yang beranggotakan perempuan), tokoh masyarakat Desa Wisata Kebonagung yang pertama kali mencetuskan ide pengembangan desa wisata, masyarakat perempuan lokal yang pernah berpartisipasi dalam kegiatan wisata dengan total jumlah informan adalah sembilan orang.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring kumpulan informasi yang telah diperoleh penulis melalui wawancara, observasi, maupun studi pustaka mengenai keterlibatan perempuan secara formal dalam pengelolaan Desa Wisata Kebonagung. Hal ini dilakukan agar dapat menyaring semua data yang diperoleh menjadi rangkuman data yang memang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah dan informasi yang berkaitan dengan topik penelitian. Hasil dari reduksi data kemudian disajikan dalam sebuah laporan sistematis yang mudah untuk dipahami baik secara keseluruhan ataupun dalam bagian-bagian sebagai bentuk dari pernyataan.

Proses terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan Interpretasi data dilakukan dengan tujuan untuk mencari makna dan pengaruh mengenai hasil penelitian. Interpretasi data dilakukan menggunakan pendekatan secara kualitatif dengan tujuan untuk menjaring data tentang keterlibatan perempuan secara formal dalam susunan kepengurusan dan pengelolaan di Desa Wisata Kebonagung, Imogiri, Bantul, Yogyakarta.

## Hasil dan Pembahasan

### Motivasi

Keterlibatan perempuan di Desa Wisata Kebonagung menjadi hal yang penting karena mereka memegang peran yang tidak bisa digantikan oleh laki-laki. Perempuan yang terlibat dalam kegiatan di Desa Wisata Kebonagung memegang peran yang identik dengan kegiatan mereka sehari-hari seperti memasak, mengurus rumah, edukasi kegiatan kerajinan dan pembuatan produk kuliner kepada para wisatawan.

Di Desa Wisata Kebonagung melalui wawancara kepada pengagag desa wisata, diketahui bahwa para perempuan lebih banyak bekerja di balik layar, sedangkan para laki-laki lebih sering berada di lapangan, selain itu mereka menjelaskan bahwa pembagian peran dalam pengelolaan di lapangan terkait keberlangsungan desa wisata ini pun sudah sesuai dengan peran gendernya.

Proses penemuan ide, perencanaan, dan lahirnya Desa Wisata Kebonagung adalah hasil dari musyawarah dan usaha dari beberapa warga desa yang semuanya laki-laki. Oleh karenanya, Desa Wisata Kebonagung berkembang dan berjalan sesuai dengan pengaruh besar dari para pendirinya. Termasuk bagaimana cara mereka membagi peran warga masyarakat dalam berjalannya kegiatan di desa wisata. Hal ini dapat dilihat dari cara mereka menunjuk perempuan untuk terlibat di divisi-divisi tertentu dalam susunan pengurus, porsi anggota dalam kepengurusan formal yang terpaut jauh antara laki-laki dan perempuan, ataupun dari cara mereka mengelola desa wisata dengan penentu keputusan yang selalu didiskusikan oleh kelompok laki-laki saja.

Langkah awal untuk mengajak para perempuan dan warga secara umum di Desa Kebonagung untuk ikut kegiatan desa wisata memakan waktu cukup lama. Awalnya pengurus kesulitan untuk menjelaskan tentang apa yang akan masyarakat dapat jika terlibat. Para pegiat Desa Wisata Kebonagung terus memberikan sosialisasi, pendekatan halus, dan selanjutnya perlahan masyarakat diedukasi untuk menerima wisatawan. Akhirnya, dua tahun setelah pembentukan resmi desa wisata dan masyarakat mulai merasakan manfaat berupa tambahan penghasilan, mereka mulai bersemangat untuk terlibat.

Mengubah kultur masyarakat pedesaan dengan cara hidup mereka yang tradisional menuju masyarakat yang harus bisa hidup bersama wisatawan dan lingkungan kegiatan wisata bukan hal yang mudah, apalagi untuk para perempuan. Hal ini merupakan sesuatu yang baru dan mereka tidak memiliki pengalaman apapun berhubungan dengan pengelolaan kegiatan wisata.

Upaya yang dilakukan oleh pengurus desa wisata untuk melibatkan perempuan pada awal pembentukan desa wisata adalah dengan meminta bantuan untuk menyiapkan penyajian makanan/konsumsi untuk wisatawan. Seiring berjalannya waktu, para perempuan mulai sadar dengan adanya manfaat berupa keuntungan ekonomi dari kegiatan wisata. Mereka mulai mengajukan diri untuk ikut dalam kegiatan desa wisata dan lingkup kegiatan mereka berkembang

bukan hanya di bagian dapur dan makanan, tapi juga mendampingi wisatawan dalam kegiatan edukasi dan pengelolaan homestay.

Keterlibatan perempuan secara formal di Desa Wisata Kebonagung, didorong oleh berbagai latar belakang yang kemudian memotivasi mereka untuk terlibat secara formal dalam susunan kepengurusan yang terbaru pada tahun 2020 ini. Pada wawancara yang telah dilakukan kepada para perempuan yang berada di jabatan sekretaris dan bendahara, mereka bergabung ke dalam susunan kepengurusan karena ditunjuk atau diminta secara halus untuk ikut ke dalam susunan kepengurusan formal desa wisata oleh ketua Desa Wisata Kebonagung. Hal ini terjadi karena desa wisata sedang membutuhkan regenerasi kepengurusan yang bisa diisi oleh anak muda, dengan harapan para pemuda dan pemudinya lebih paham dan mempunyai keahlian teknologi (terutama penggunaan komputer, informasi, dan media sosial) yang lebih mumpuni dari pada para pengurus sebelumnya.

Perempuan yang berada pada jabatan sekretaris dan bendahara ini juga bergabung sebagai anggota Karang Taruna Desa Kebonagung. Selain karena diminta tolong oleh pihak desa wisata, mereka juga membawa kepentingan dari organisasi Karang Taruna Desa Kebonagung yang berharap untuk diberikan akses dalam susunan kepengurusan dan pengelolaan desa wisata.

Keputusan pengelola Desa Wisata Kebonagung untuk memilih pengurus perempuan dalam jabatan sekretaris dan bendahara dalam jajaran kepengurusan formal didasarkan pada kemampuan mereka dalam penggunaan teknologi, masih muda, aktif dalam kegiatan karang taruna, dan mereka adalah perempuan. Mereka sebagai perempuan dianggap lebih telaten, teliti dan lebih rapi dalam mengerjakan tugas administrasi dan kesekretariatan dalam pengelolaan desa wisata.

Dalam wawancara yang telah dilakukan kepada para perempuan pengurus formal Desa Wisata Kebonagung, setelah ditunjuk untuk terlibat dalam susunan pengurus, mereka pun mulai memiliki motivasi lain untuk ikut bergabung seperti untuk menambah keterampilan dan belajar mengenai pengelolaan desa wisata dan manajemen desa wisata, mereka juga memiliki harapan untuk menambah keahlian atau keterampilan dalam bidang lain.

Adapun, motivasi secara umum para perempuan yang ikut berperan dalam kegiatan wisata Desa Wisata Kebonagung dilatarbelakangi oleh faktor penambahan pendapatan. Hal yang sama juga disampaikan oleh koordinator pengelolaan konsumsi serta tiga ibu lain yang juga berperan sebagai tim konsumsi, mereka menjadi lebih bersemangat dengan kedatangan wisatawan karena adanya penambahan pendapatan tersebut.

Motivasi utama para perempuan yang terlibat dalam susunan formal tahun kepengurusan saat ini berasal dari penunjukan para pengurus desa wisata lainnya. Hal ini juga berkaitan dengan pembahasan mengenai organisasi pengelolaan desa wisata yang dikelola dengan dominasi laki-laki serta penentu keputusan sebagian besar diputuskan oleh laki-laki. Dengan hal tersebut, para



pengurus dianggap memiliki kuasa untuk menunjuk para perempuan yang menurut mereka mau dan mampu untuk berada dalam susunan pengurus formal desa wisata.

Di lain sisi, para perempuan yang terlibat dalam susunan formal saat ini tidak begitu mengetahui mengenai agenda desa wisata. Ditambah lagi, pembentukan pengurus baru bertepatan dengan kondisi pandemi dimana kegiatan wisata berhenti total dan tidak ada kunjungan wisatawan. Hal ini menjadikan para perempuan tidak mengetahui, tidak tertarik, dan tidak memiliki motivasi untuk terlibat secara formal dalam pengelolaan kegiatan wisata di Desa Wisata Kebonagung.

Dalam rangka untuk menjaga motivasi diri mereka sebagai perempuan yang ikut ke dalam susunan formal, mereka memiliki beberapa alasan yang dapat mendorong diri mereka agar aktif dalam kepengurusan ini. Beberapa alasan seperti telah diberikan tanggung jawab dan dipercaya untuk membantu menyampaikan informasi dari para pengurus harian desa wisata kepada para ibu-ibu di dapur ataupun karena adanya dukungan dari kelompok Karang Taruna.

### Kesempatan atau Peluang

Pengurus Desa Wisata Kebonagung tidak keberatan mengenai perempuan yang ingin terlibat di susunan kepengurusan desa wisata. Mereka mengizinkan para perempuan untuk berada di susunan formal dan menjelaskan bahwa peluang dan kesempatan sangat terbuka. Namun, hal ini dengan catatan para perempuan yang ingin terlibat mempunyai kemampuan dan bersedia untuk berdinamika dalam pengelolaan desa wisata. Jika para perempuan mau dan mampu, para pengurus lain pun tidak akan mempermasalahkannya

Para pengurus formal perempuan juga merasa bahwa memang ada peluang untuk berada di susunan kepengurusan. Meskipun begitu, mereka menuturkan bahwa terbukanya peluang ini lebih ke keterlibatan perempuan secara umum sedangkan untuk berada di sektor formal masih minim dan terbatas dalam seksi konsumsi saja.

Di Desa Wisata Kebonagung tidak ada peraturan mengenai minimal porsi keterlibatan perempuan di kepengurusan desa wisata. Meskipun demikian, ketua pengurus desa wisata menjelaskan bahwa mereka berpatokan kepada peraturan minimal porsi 30% keterlibatan perempuan seperti yang tertulis di UU No. 2 Tahun 2008. Namun pada kenyataannya, dalam susunan yang terbaru hanya ada 18% dengan porsi 5 perempuan dari 28 anggota di susunan pengurus Desa Wisata tahun 2020 tersebut.

Perempuan yang berada dalam jabatan pengurus formal mengungkapkan, keterlibatan perempuan dalam susunan kepengurusan suatu organisasi, baik ada maupun tidak ada peraturannya, sangat diperlukan. Hal tersebut diperlukan agar ada variasi dan perbedaan antara cara berpikir laki-laki dan perempuan, mereka juga menyinggung mengenai sifat-sifat dan perilaku yang sering diasosiasikan dengan gender seperti perempuan lebih teliti, terampil, penyabar, berpikir dan berperilaku menggunakan perasaan. Hal ini dibutuhkan untuk melengkapi,

menyeimbangkan dan membantu pemecahan masalah antara pendapat laki-laki dan pendapat perempuan.

Mereka juga menyampaikan bahwa peran perempuan di susunan formal itu penting karena, jika nama individu perempuan tersebut sudah dicatat dalam SK, mereka mempunyai tanggung jawab dan kuasa. Mereka menambahkan, porsi perempuan di susunan kepengurusan harusnya bisa mencapai 50%-50%, antara laki-laki dan perempuan agar seimbang. Mereka juga berpikiran bahwa seharusnya keterlibatan perempuan di susunan pengurus juga bisa disebar per seksi, dengan minimal satu anggota perempuan per seksi. Hal ini dilakukan untuk penguatan perempuan di susunan tersebut dan perannya di desa wisata karena sebagian besar yang mengurus kegiatan wisata bersama wisatawan adalah perempuan.

Urgensi untuk pelibatan perempuan lebih banyak dalam susunan formal di Desa Wisata Kebonagung juga didasari karena bentuk pengembangan pariwisata di desa ini yang menggunakan prinsip pariwisata berbasis masyarakat. Dalam pariwisata berbasis masyarakat pelibatan semua pihak menjadi hal yang penting. Seperti yang dikemukakan oleh Suansri (2003), bahwa partisipasi dalam pengelolaan sebuah pariwisata berbasis masyarakat harus melibatkan grup yang beragam di desa tersebut, termasuk para tetua, perempuan, dan para pemuda.

Para perempuan yang berkecimpung di pengelolaan desa wisata baik secara formal maupun non formal berharap bahwa pengurus Desa Wisata Kebonagung dapat memberikan kesempatan dan mendukung untuk perempuan masuk di kepengurusan. Para pengurus perempuan mengusulkan agar pengurus sebelumnya membuat daftar perempuan yang memiliki keterampilan di bidang tertentu kemudian nama mereka bisa dimasukkan dalam susunan resmi SK Desa Wisata. Mereka juga, menambahkan bahwa perempuan secara umum selama ini mereka sudah terlibat tapi, jika dimasukkan dalam susunan kepengurusan mereka akan lebih memiliki kekuatan, perlindungan dan lebih diakui.

Untuk pemerintah desa, pengurus perempuan berharap agar mereka dapat menjembatani para perempuan untuk terlibat di kepengurusan formal di desa wisata. Karena mereka melihat bahwa pengurus desa wisata terbuka untuk pemuda dan perempuan mulai pada periode pergantian pengurus baru di 2020. Sebelumnya, para perempuan tidak bisa masuk karena kurang keterbukaan itu. Mereka melihat bahwa kepengurusan sebelumnya juga kurang komunikasi, setiap pergantian periode, pengurusnya individu-individu yang sama.

### Kemampuan

Para pengurus desa wisata menjelaskan bahwa kemampuan adalah hal yang penting, akan tetapi hal yang harus dimiliki perempuan jika ingin berada dalam susunan pengurus adalah kemauan untuk ikut berperan dan berproses. Pernyataan ini juga didukung oleh hampir semua informan yang diwawancarai penulis. Tidak ada kriteria khusus, seperti derajat pendidikan atau pengalaman kerja untuk penunjukan perempuan berada di susunan pengurus formal Desa Wisata Kebonagung.

Dalam kepengurusan desa wisata yang terbaru, Ketua Desa Wisata memilih perempuan di jabatan bendahara dan sekretaris dikarenakan mereka masih muda dan kemampuan mereka dalam penggunaan teknologi komputer dan mereka adalah anak muda yang aktif dalam karang taruna dan di dusun setempat, sanggup berada di susunan pengurus, pernah mengikuti kegiatan pelatihan yang diadakan oleh Dinas Pariwisata Kab. Bantul, dan bisa bertanggung jawab dengan tugas.

Sedangkan alasan pemilihan jabatan koordinator konsumsi dilatarbelakangi karena perempuan tersebut sudah berperan sebagai ketua Dasawisma dusun setempat, memiliki keaktifan berpendapat dan kemampuan penyelesaian masalah yang baik, cukup vokal juga dan telah dipercaya oleh para ibu-ibu lain untuk memimpin sehingga koordinasi akan lebih cepat, mudah dan efisien.

Kemampuan intelektual yang diharapkan ada dalam para perempuan yang ingin masuk ke dalam susunan formal desa wisata atau sudah berada di susunan adalah kemampuan berbicara di depan umum, paham mengenai Desa Wisata Kebonagung dan kemampuan dalam berbahasa Inggris dasar. Meskipun demikian, kepengurusan di susunan terbaru tahun 2020 ini sifatnya mendesak. Jadi, anggota baru dipilih berdasarkan kesediaan dan keaktifan mereka dalam kegiatan wisata dan dalam forum diskusi. Hal ini menjelaskan bahwa kemampuan bukanlah yang sangat utama, karena bisa dipelajari sejalan dengan kegiatan pengelolaan wisata.

Kemampuan intelektual juga harus diimbangi oleh kemampuan emosional, termasuk sikap dan perilaku yang ada dalam para perempuan di susunan pengurus maupun para perempuan yang terlibat secara langsung bersama wisatawan. Kemampuan emosional yang ada pada pengurus formal perempuan, seperti yang telah disampaikan oleh ketua desa wisata dan pengurus lama desa wisata, yang ada pada pengurus perempuan yang baru adalah mereka aktif dalam forum desa wisata dan aktif dalam kegiatan di dusun mereka masing-masing, bertanggung jawab, memiliki kemampuan komunikasi yang memadai, memiliki hubungan baik dengan warga setempat dan memiliki jiwa pemimpin.

Selanjutnya, untuk kemampuan sikap dan perilaku yang diharapkan untuk ada dalam diri perempuan yang terlibat adalah mereka harus mengikuti kegiatan di desa wisata dengan hati yang senang dan ikut terlibat dengan sepenuh hati. Mereka harus mempunyai semangat yang dapat ditularkan pada wisatawan. Pengurus Desa Wisata menuturkan bahwa jika ingin ikut terlibat di dalam desa wisata pandangan pertama bukan memikirkan profit, tetapi adalah keinginan untuk memajukan desa. Kemampuan sikap dan perilaku yang diharapkan untuk ada dalam diri perempuan yang terlibat dalam kegiatan wisata adalah ramah dan terbuka dengan wisatawan, tidak membatasi diri terhadap wisatawan yang datang, komunikatif dan mendukung terpenuhinya poin-poin Sapta Pesona Pariwisata.

Para perempuan yang berada di susunan formal, menyatakan bahwa kemampuan perilaku dan karakter yang harus ada dalam perempuan yang ingin terlibat, selain harus ada keinginan ikut,

adalah mereka harus berkomitmen untuk tetap aktif dalam desa wisata meskipun dalam kondisi sepi atau vakum contohnya karena pandemi covid-19 dua tahun kebelakang ini. Selain itu, perempuan juga harus mempunyai rasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap organisasi kepengurusan tersebut, ramah kepada wisatawan, terbuka menerima wisatawan yang datang, dan dapat menjaga nama baik desa.

Dapat dikatakan bahwa kondisi kemampuan sosial para perempuan yang ada dalam susunan kepengurusan desa wisata cukup mumpuni. Hal ini dapat terlihat karena mereka telah ditunjuk dan dipercaya oleh para pengurus lama untuk masuk dalam susunan kepengurusan desa wisata dengan kemampuan sosial tersebut. Perempuan yang berada dalam jabatan bendahara dan sekretaris aktif dalam kegiatan masyarakat, seperti aktif dalam perkumpulan muda-mudi, perkumpulan remaja masjid dan mereka juga aktif dalam kegiatan bersama karang taruna. Kemampuan kerjasama dan komunikasi mereka kepada masyarakat lain bisa diandalkan

Pengurus formal lain, yang berada di jabatan koor konsumsi, merupakan pribadi yang sangat terbuka dan aktif dalam kegiatan-kegiatan bersama masyarakat. Kemampuan sosial dalam kerjasama dengan masyarakat perempuan dalam pengelolaan sajian konsumsi jumlah yang besar untuk wisatawan, serta kemampuan pemecahan masalah yang dimilikinya sangat baik.

Di Desa Wisata Kebonagung tidak ada pelatihan internal khusus untuk perempuan di susunan kepengurusan desa wisata. Meskipun begitu, Desa Wisata Kebonagung mendapat pelatihan wisata yang dilakukan oleh para instansi. Instansi-instansi ini seperti Dinas Pariwisata Kab. Bantul, program pengabdian (KKN/Kuliah Kerja Nyata) dari perguruan tinggi di Yogyakarta, hotel-hotel, dan dari lembaga-lembaga pelatihan yang bergerak di bidang pariwisata bagi paraarganya.

Meskipun sebelumnya telah dituliskan bahwa peluang untuk perempuan untuk berada di susunan desa wisata itu terbuka, sebagian besar perempuan di Desa Wisata Kebonagung belum mampu dan kebanyakan dari mereka tidak mau untuk berada di susunan kepengurusan. Perempuan mampu untuk terlibat secara langsung mendampingi kegiatan bersama wisatawan mereka tapi, jika masuk ke dalam ranah akademik (menjelaskan Desa Wisata Kebonagung dan pengelolaan desa wisata untuk kebutuhan penelitian), pengambilan keputusan, penyelesaian masalah, atau di ranah manajemen masih kurang, karena kebanyakan dari mereka tidak menempuh tingkat pendidikan yang tinggi. Jadi sumber daya perempuan yang berkualitas masih kurang.

Seorang pengurus formal perempuan yang mengenal baik para perempuan yang terlibat dalam kegiatan desa wisata menuturkan bahwa perempuan di Desa Wisata Kebonagung jika harus menjadi pengurus formal desa wisata, mereka belum mampu dan kebanyakan dari mereka tidak mau ikut di susunan. Hal ini dilatarbelakangi oleh tingkat pendidikan para perempuan (ibu-ibu) yang terlibat di pusat wisata Desa Wisata Kebonagung hanya sampai SMP atau maksimal SMA/SMK. Di samping itu, masih beredar anggapan bahwa perempuan seharusnya mengurus rumah saja, dan anggapan bahwa susunan pengurus seharusnya diisi oleh laki-laki saja.

Selain itu, pengurus perempuan senior ini juga menuturkan bahwa, ada perempuan di dalam susunan formal pun tidak terlalu berperan secara signifikan karena penentu keputusan itu tetap ada di laki-laki. Selain itu, penulisan nama perempuan di dalam susunan kepengurusan di SK Desa Wisata hanya formalitas untuk memberikan kesan bahwa perempuan juga terlibat di dalam susunan pengurus.

### Hambatan

Penelitian menemukan bahwa dalam setiap poin motivasi, kesempatan, maupun kemampuan perempuan untuk terlibat dalam kepengurusan formal desa wisata, terdapat hambatan. Hambatan-hambatan inilah yang kadang membuat keterlibatan para perempuan tidak dapat maksimal dalam kegiatan di Desa Wisata Kebonagung.

Hambatan yang ditemukan pada poin motivasi adalah bahwa perempuan di Desa Wisata Kebonagung tidak mempunyai motivasi yang berasal dari diri sendiri untuk ikut terlibat dalam kepengurusan formal. Perempuan yang berada di kepengurusan saat ini pun dipilih oleh pengurus sebelumnya. Hambatan dari tidak adanya motivasi para perempuan ini bisa disebabkan karena adanya anggapan yang mereka buat sendiri mengenai perempuan yang seharusnya mengurus rumah saja dan mereka tidak perlu ada dalam suatu posisi yang tinggi dalam sebuah organisasi. Selain itu, karena dari dahulu pengurus desa wisata kebanyakan laki-laki, hal ini menyebabkan terbentuknya anggapan jika susunan pengurus memang hanya untuk laki-laki saja.

Para pengurus perempuan menuturkan bahwa hambatan bagi perempuan yang berada di susunan formal desa wisata, ada pada komunikasi antar pengurusnya. Mereka memiliki rasa takut salah untuk mengungkapkan pendapat atau memberi masukan kepada para pengurus-pengurus yang sudah senior. Di lain sisi, para pengurus yang sudah lama pun juga mungkin bingung untuk menemukan cara bagaimana mendekati pengurus perempuan ini.

Di Desa Wisata Kebonagung, kepengurusan desa wisata adalah pekerjaan yang tidak bisa langsung menghasilkan keuntungan. Desa wisata dan pengurusnya akan mendapatkan keuntungan jika mereka berhasil menjual paket kepada wisatawan. Padahal, kebanyakan perempuan yang bersedia terlibat dalam kegiatan bersama wisata dilatarbelakangi oleh adanya tambahan ekonomi. Hal ini menjadikan salah satu hambatan bagi perempuan karena mereka tidak mempunyai motivasi untuk terlibat ke dalam susunan formal.

Hambatan dalam kesempatan perempuan untuk terlibat dalam kepengurusan formal di Desa Wisata Kebonagung dilatarbelakangi oleh beberapa hal. Konstruksi sosial adalah salah satu diantaranya. Konstruksi sosial inilah yang kemudian mempengaruhi penempatan peran perempuan untuk berada dalam susunan formal maupun informal desa wisata oleh para pengurus sebelumnya pada seksi atau divisi yang dikonstruksikan masyarakat/sosial kepada mereka.

Peran perempuan di susunan kepengurusan Desa Wisata Kebonagung disesuaikan dengan stereotip peran perempuan yang berlaku di masyarakat wilayah tersebut. Perempuan yang

berada di susunan formal aktif yang dibentuk pada tahun 2020, ditempatkan pada seksi-seksi yang identik dengan peran gender perempuan seperti posisi sekretaris, bendahara, seksi konsumsi, dan seksi homestay. Posisi perempuan pada susunan yang masih berjalan saat ini hanya terbatas pada seksi tersebut.

Ketua desa wisata menuturkan salah satu hambatan minimnya kesempatan dan peluang perempuan untuk ikut susunan formal desa wisata adalah hambatan dari keluarga dan tanggung jawab mereka sebagai ibu rumah tangga, seperti yang disampaikan oleh Ketua desa wisata Kebonagung,

“Ada kan perempuan kadang tidak diizinkan suaminya untuk jadi pengurus. Itu termasuk faktor hambatan kalau di desa. Karena emansipasi wanita di desa itu kan masih kurang ya dan perempuan yang ingin terlibat di level yang lebih tinggi harus ada izin dari suaminya. Kalau yang masih muda harus ada ijin dari orangtuanya. Selain itu soal waktu juga, nggak bisa fokus antara rumah dan desa wisata, jadi nggak bisa full ikut”

Dari hasil wawancara tersebut juga dapat diketahui bahwa perempuan terkadang tidak diizinkan suaminya untuk jadi pengurus. Selain itu, ia menambahkan jika emansipasi perempuan di desa itu masih kurang dan berjalan lambat tidak seperti di kota. Perempuan yang ingin terlibat di tingkat yang lebih tinggi harus memiliki izin dari suaminya.

Selain hambatan dari orang terdekat, para perempuan terutama ibu-ibu mempunyai banyak tanggung jawab seperti pekerjaan rumah dan mengurus anak sehingga kebanyakan para perempuan tidak bisa fokus dan tidak bisa sepanjang waktu siap untuk kegiatan-kegiatan pengelolaan desa wisata. Hal ini juga dapat dikatakan sebagai peran ganda yang pada penelitian ini dapat dicontohkan sebagai peran untuk mengurus rumah/keluarga dan peran untuk terlibat dalam kepengurusan formal di mana hal ini terkadang memberatkan mereka untuk membagi waktu dan pikiran.

Di lain sisi, beberapa pengurus formal perempuan menerangkan bahwa hambatan untuk terlibat ke dalam susunan pengurus desa wisata itu bukan dari faktor eksternal seperti suami, keluarga atau orang tua. Hambatan ini muncul dari dalam diri perempuan. Para perempuan di Desa Wisata Kebonagung secara umum belum mampu dan tidak mau untuk berada di posisi yang lebih tinggi apalagi di suatu susunan formal di mana nama mereka tercantum dalam surat resmi. Hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan yang rendah dan mereka merasa tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk ada dalam susunan formal desa wisata.

Hambatan kemampuan bukan hanya dalam kemampuan intelektual, hambatan juga termasuk dalam kemampuan emosional dan sosial. Para perempuan secara umum tidak terlalu suka mengemukakan pendapat di muka umum dan tidak terlalu aktif dalam diskusi forum. Mereka lebih suka untuk menerima dan melaksanakan perintah dari para pengurus tingkat atas, bukan untuk memutuskan sesuatu. Perempuan di pedesaan seperti di Desa Wisata Kebonagung masih tidak

percaya diri dan minder jika harus ditempatkan dalam suatu posisi formal dalam kepengurusan. Mereka lebih sering menolak dan saling lempar nama antar para perempuannya. Adapun, terkadang perempuan di pedesaan masih suka bergunjing membicarakan perempuan lain secara diam-diam, hal ini juga terkadang membuat perempuan tidak mau untuk berada diposisi yang menempatkan mereka sebagai pusat kritik ketika mereka tidak melaksanakan tugas mereka dengan baik.

## Simpulan

Keterlibatan perempuan di Desa Wisata Kebonagung dalam ranah kepengurusan organisasi secara formal masih rendah serta jumlah partisipasi perempuan dalam susunan masih sangat terbatas dan minim. Partisipasi perempuan yang ada dalam susunan kepengurusan formal pada sesuai SK Desa Wisata pada tahun 2020, yang terbaru, hanya ada tiga individu perempuan dan perwakilan dua kelompok PKK dari 28 orang anggota kepengurusan Desa Wisata Kebonagung. Sebagai salah satu Desa Wisata pelopor yang telah berdiri sejak hampir 20 tahun, keterlibatan secara formal dalam pengelolaan manajemen Desa Wisata Kebonagung seperti anggota utama pengurus harian desa wisata belum terlaksana secara maksimal. Jumlah perempuan yang terlibat di susunan pengurus formal masih minim ini disebabkan oleh beberapa hal. Dapat disebutkan seperti kurangnya motivasi, peluang dan kesempatan yang tidak bisa digunakan dengan baik, serta kemampuan yang belum mencukupi.

Para perempuan yang terlibat secara formal dalam kepengurusan Desa Wisata lebih banyak didorong oleh permintaan atau penunjukan dari pengelola harian Desa Wisata Kebonagung dan dari organisasi di mana mereka ikut bergabung serta lingkungan sekitar agar mereka terlibat dan menjadi perwakilan perempuan. Keterlibatan mereka dalam susunan kepengurusan kemudian mendorong motivasi dari dalam diri mereka. Motivasi ini berupa keinginan untuk menambah penghasilan, pengetahuan, dan keterampilan dalam pengelolaan kegiatan wisata.

Pemberian tugas dan wewenang bagi perempuan yang ditunjuk ke dalam susunan formal pun sangat terkait dengan konstruksi sosial mengenai peran yang identik dengan perempuan. Perempuan yang tergabung dalam susunan kepengurusan hanya ditempatkan pada seksi-seksi yang menurut para pimpinan pengurus desa wisata, yang semuanya laki-laki, sering dikaitkan dengan peran gender perempuan seperti pada posisi sekretaris, bendahara, seksi konsumsi, dan seksi homestay.

Meskipun para pimpinan menyatakan bahwa mereka terbuka dengan keterlibatan perempuan dalam kepengurusan Desa Wisata, kesempatan untuk berpartisipasi kadang kala menjadi sulit dimanfaatkan dengan baik karena komunikasi dari pengurus desa wisata dengan para warga perempuan yang tidak lancar. Hal ini membuat para perempuan tidak tahu bagaimana cara untuk terlibat di desa wisata. Selain itu, para perempuan secara umum di Desa Wisata Kebonagung masih minder, tidak percaya diri, dan memiliki tanggung jawab lain dibandingkan jika harus terlibat dalam susunan formal.

Pada parameter kemampuan, para perempuan yang saat ini bergabung dalam susunan formal sebenarnya telah mempunyai kemampuan yang diperlukan dan mereka kuasai sesuai harapan dari pengurus desa wisata yang menunjuk mereka. Kemampuan ini berupa kemampuan intelektual yang baik, dalam pengoperasian komputer, pemanfaatan teknologi informasi, dan cepat tanggap dalam menangani permasalahan. Mereka juga memiliki kemampuan emosional serta sosial yang mendukung. Seperti aktif dalam kegiatan-kegiatan bersama masyarakat memiliki kemampuan sosial dalam kerjasama dan komunikasi mereka kepada masyarakat lain bisa diandalkan

Hambatan yang dirasakan perempuan untuk berada dalam susunan formal sangat beragam. Hambatan ini muncul dari dalam diri perempuan maupun dari lingkungan sekitar. Beberapa anggapan sosial yang menghambat keterlibatan perempuan dalam kepengurusan Desa Wisata, misalnya: anggapan bahwa perempuan seharusnya hanya mengurus rumah dan keluarga saja dan tidak perlu ikut ke dalam sebuah posisi di suatu organisasi serta anggapan tidak adanya keuntungan langsung jika terlibat dalam posisi formal. Hambatan yang dihadapi perempuan ketika hendak terlibat dalam kepengurusan Desa Wisata ditimbulkan dari peran ganda perempuan yang harus mengurus rumah dan keluarga sekaligus mengurus kegiatan desa wisata; kemampuan pengetahuan yang terbatas; dan adanya konstruksi sosial mengenai peran perempuan dalam sebuah kepengurusan organisasi yang dibatasi pada posisi-posisi yang dikaitkan dengan peran gender mereka sebagai perempuan di ranah domestik. .

Berdasarkan penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi yang ingin diajukan. Pertama terkait rekomendasi praktis; para pengurus yang telah lama berperan dalam pengelolaan Desa Wisata Kebonagung perlu membangun kedekatan dan komunikasi yang berkelanjutan dengan para perempuan di Desa Kebonagung, terutama kepada para perempuan yang bertempat tinggal di Dusun utama yang digunakan sebagai pusat kegiatan wisata. Hal ini bertujuan agar para perempuan dapat mengetahui, sadar, dan merasa diperlukan sehingga mereka mau terlibat aktif baik secara formal maupun non-formal dalam kegiatan wisata.

Kedua, partisipasi perempuan untuk bergabung ke dalam susunan kepengurusan merupakan hal yang penting, hal ini juga disebabkan karena peran dan bantuan mereka dalam pelaksanaan kegiatan wisata di Desa Wisata Kebonagung sangat vital, terutama dalam pengurusan konsumsi wisatawan dan pengelolaan homestay. Oleh karena itu, perempuan juga perlu hadir dalam susunan manajemen kepengurusan tingkat atas, sehingga mereka dapat terwakili dan memiliki kekuatan serta hak untuk ikut merencanakan dan membuat keputusan.

Ketiga, para perempuan di Desa Kebonagung masih memiliki budaya sosial pedesaan yang kuat. Mereka masih memiliki cara berpikir bahwa perempuan memang tugasnya berada di rumah, memasak, mengurus anak, dan tidak seharusnya memimpin sesuatu yang penting pada organisasi sosial. Untuk sedikit memotivasi para perempuan untuk ikut serta di kepengurusan formal dapat dilakukan dengan motivasi *peer to peer* antar para perempuan. Di Desa Wisata



Kebonagung ada beberapa perempuan yang memang aktif dan memiliki kemampuan untuk memimpin dan mengambil keputusan. Para perempuan ini dapat menjadi model, perantara, dan pendorong untuk para perempuan agar tidak perlu merasa minder dan takut untuk ikut serta di kepengurusan formal desa wisata.

Saran untuk penelitian selanjutnya dengan topik yang sama mengenai keterlibatan perempuan dalam pengelolaan desa wisata adalah penelitian mendalam mengenai aspek sosiokultural yang mendorong perempuan untuk terlibat dalam suatu kegiatan pengelolaan pariwisata. Aspek sosiokultural ini menjadi penting karena para masyarakat dan perempuan terbentuk sesuai kondisi sosial dan budaya yang ada di wilayah mereka tinggal. Selanjutnya, diperlukan penelitian yang lebih rinci mengenai motivasi perempuan untuk terlibat dalam susunan informal. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa motivasi perempuan untuk terlibat dalam kegiatan pariwisata adalah karena faktor tambahan ekonomi. Peneliti menemukan bahwa masih diperlukan penelitian lebih lanjut dan mendalam untuk memastikan ulang apakah terdapat motivasi yang lainnya.

Selanjutnya, penelitian lanjutan juga dapat dituliskan dengan topik mengenai perhitungan waktu luang perempuan ibu rumah tangga selama di rumah. Hal ini dapat ditelusuri lebih dalam, dengan premis bahwa perempuan yang berkegiatan sebagai ibu rumah tangga yang memiliki kegiatan sehari-hari mengurus rumah dan keluarga pun sebenarnya masih memiliki waktu yang tersisa untuk ikut ke dalam sebuah susunan formal pengelolaan desa wisata.

## Daftar Pustaka

- Andani, F., & Musadad, M. (2017). Peran Perempuan Dalam Kegiatan Pariwisata di Kampung Wisata Tebing Tinggi Okura Kota Pekanbaru. *Doctoral dissertation*. Riau University.
- Bahaire, T., and M. Elliott-White (1999). Community Participation in Tourism Planning and Development in the Historic City of York, England. *Current Issues in Tourism*, 2 (3): 243-76.
- Bettman, J. R., & Park, C. W. (1980). Effects of prior knowledge and experience and phase of the choice process on consumer decision processes: A protocol analysis. *Journal of consumer research*, 7(3), 234-248.
- Blackstone, A. (2003). Gender roles and society. In J.R. Miller, R. M. Lerner, & L. B. Schiamberg (Eds.), *Human ecology: An encyclopedia of children, families, communities, and environments*. Santa Barbara: ABC-Clío.
- Cave, P., & Kilic, S. (2010). The role of women in tourism employment with special reference to Antalya, Turkey. *Journal of Hospitality Marketing & Management*, 19(3), 280-292.
- Cole, S. (2006). Cultural tourism, community participation and empowerment. *Cultural tourism in a changing world: Politics, participation and (re) presentation*, 89-103.
- Faturochman (2002). *Keadilan Perspektif Psikologi*. Unit Penerbit Fakultas Psikologi UGM – Pustaka Pelajar.
- Genç, R. (2018). The Impact of Tourism in the Reduction of Gender Inequality. *Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi E-Dergi*, 7 (1), 20-35.

- Hung, K., Sirakaya-Turk, E., & Ingram, L. J. (2011). Testing the efficacy of an integrative model for community participation. *Journal of Travel Research*, 50(3), 276-288.
- Jamal, T. B., and D. Getz (1995). Collaboration Theory and Community Tourism Planning. *Annals of Tourism Research*, 22 (1): 186- 204.
- Kayat, K. (2002). Exploring factors influencing individual participation in community based tourism: The case of Kampung relau homestay program, Malaysia. *Asia Pacific Journal of Tourism Research*, 7(2), 19-27.
- Khaerany, N. (2019). Peran Ganda Perempuan Pada Keluarga Petani Desa Pallantikang Kabupaten Gowa. *Doctoral dissertation*. Pascasarjana.
- Kitchener, K. S. (1988). Dual role relationships: What makes them so problematic?. *Journal of Counseling & Development*, 67(4), 217-221.
- Mosse, G. (1996). *The image of man: The creation of modern masculinity*. Oxford: Oxford University Press.
- Muhadjir, Darwin. (2005). *Negara dan Perempuan: Reorientasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Wacana.
- Narimawati, Umi. (2007). *Riset Manajemen dan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Agung.
- Ngalim Purwanto, M. (2006). Pengertian Motivasi dalam Dimyati, Mudjiono (Ed). *Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya.
- Ridgeway, C. L., & Smith-Lovin, L. (1999). The gender system and interaction. *Annual review of sociology*, 191-216.
- Rokhimah, S. (2015). Patriarkhisme dan ketidakadilan gender. *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender*, 6(1).
- Sakina, A. I. (2017). Menyoroti budaya patriarki di Indonesia. *Share: Social Work Journal*, 7(1), 71-80.
- Sapiah, S., Mursalin, A., & Armansyah, Y. (2020). Keterwakilan Perempuan dalam Kepengurusan Partai Politik Menurut Uu No. 2 Tahun 2008 di Provinsi Jambi (Studi Kasus PDIP dan PPP Tahun 2016-2020). *Doctoral dissertation*. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Simmons, D. G. (1994). Community Participation in Tourism Planning. *Tourism Management*, 15 (2): 98-108.
- Suansri, P. (2003). *Community based tourism handbook*. Bangkok: Responsible Ecological Social Tour-REST.
- Susanty, S. (2020). Dimensi Global Pariwisata: Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) Tentang Kesetaraan Gender Dalam Industri Pariwisata. *Media Bina Ilmiah*, 14(7), 2919-2926.
- Swain, M. B. (1995). Gender in tourism. *Annals of tourism research*, 22(2): 258.

- Timothy, D. J. (2002). Tourism and Community Development Issues, in *Tourism and Development: Concepts and Issues*, edited by R. Sharpley and D. Telfer. Clevedon, Avon, UK: *Channel View*, pp.149-64.
- Weedon, C. (1987). *Feminist practice & poststructuralist theory*. Oxford, England: Basil Blackwell.
- Zhang, J., & Zhang, Y. (2020). Tourism and gender equality: An Asian perspective. *Annals of Tourism Research* 85, 103067.